

Pendidikan Mitigasi Bencana di sekolah inklusi

Oleh : Pujaningsih M.Pd dan Nur Azizah M.Ed

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai bencana alam di Insarannesia silih berganti mewarnai peristiwa yang banyak menelan korban jiwa selama 10 tahun terakhir. Mulai dari gempa bumi disertai tsunami di Aceh yang menelan korban jiwa 1,041.0 45.000 orang siswa tewas dan 1, 870 orang guru hilang/tewas kemudian disusul berbagai bencana alam seperti banjir dan gunung meletus. Peristiwa tersebut berulang-ulang terjadi dan banyak menelan korban jiwa serta berbagai kerugian lainnya.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa ada komitmen dan itikad yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya salah satunya adalah LPTK pencetak calon guru. Hal tersebut seiring dengan strategi nasional pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam sistem pendidikan yang termuat dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 sebagai acuan nasional yang mempunyai visi untuk mewujudkan budaya aman dan siaga terhadap bencana melalui sistem desentralisasi pendidikan yang mampu mendukung pengurangan risiko bencana melalui upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas di sektor pendidikan. Penerapan pengarusutamaan tersebut di atas memprioritaskan integrasi materi mitigasi bencana dalam berbagai aktivitas pembelajaran di sekolah.

Hal yang belum termuat secara eksplisit dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 adalah strategi untuk kelompok rentan yang ada di sekolah. Kelompok rentan yang dimaksud adalah ibu hamil, orang lanjut usia serta anak berkebutuhan khusus. Keberadaan anak berkebutuhan khusus banyak ditemukan di sekolah khusus dan sekolah inklusi. Seiring penerapan kebijakan pendidikan inklusi yang di atur dalam Permendiknas no 70 tahun 2009 maka jumlah sekolah inklusi yang melayani berbagai anak berkebutuhan khusus terus bertambah dari tahun ke tahun. Kesiapan sekolah inklusi untuk program PRB memerlukan persiapan tersendiri. Pemahaman guru terhadap berbagai kondisi anak berkebutuhan khusus akan mempermudah penerapan ke-empat hal di atas serta pemberian materi PRB yang

diintegrasikan dalam berbagai aktivitas di sekolah. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai keragaman kondisi dan kemampuan menyerap materi. Pada tahun 2009 telah dilakukan kerjasama antara Jurusan PLB UNY dengan ASB (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V) untuk menghasilkan buku panduan mitigasi bencana di sekolah inklusi. Melalui kerjasama ini juga dihasilkan matakuliah yang diintegrasikan materi pengurangan resiko bencana di sekolah inklusi.

B. Bencana Alam dan Kerugiannya di Insarannesia

Berada pada posisi pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat, dan Lempeng Samudera Pasifik di bagian timur, menurut para pakar geologi maka wilayah Insarannesia menjadi daerah yang rawan bencana alam. Situasi ini juga seiring berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di Insarannesia. Tabel berikut menunjukkan berbagai bencana alam yang terjadi sejak tahun 2004-2010.

Tabel 1. Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di Insarannesia

No	Bencana	Waktu Kejadian	Kerusakan dan Kerugian
1.	Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh-Nias	Desember 2004	41,400.00
2.	Gempa di DIY - Jawa Tengah	Mei 2006	29,100.00
3.	Semburan Lumpur di Sisaranarjo, Jawa E	Mei 2006	7,300.00
4.	Banjir di Jakarta	Februari 2007	5,160.00
5.	Gempa di Sumatera Barat	Maret 2007	1,080.87
6.	Gempa di Bengkulu-Sumatera Barat	September 2007	1,790.93
7.	Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Barat	Januari 2008	1,691.47
8.	Gempa Bumi di Jawa Barat	September 2009	6,900.00
9.	Gempa di Sumatera Barat	September 2009	20,866.60
10	Bencana alam lainnya	2004-2009	34,000.00
11.	Banjir di Wasior, Papua Barat	Oktober 2010	277.90
12	Gempa dan tsunami, Mentawai	Oktober 2010	Belum diketahui
13	Gunung letusan Merapi, Tengah Jawa	Oktober 2010	Belum diketahui

Sumber: *Berbagai Laporan Kerusakan Bencana Alam dan Penilaian Rugi (2004-2010) dalam Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga (2010) dalam pemaparan Pertemuan Tingkat Tinggi pada Perlindungan Hak Anak di Asia dan Pasifik, Beijing, RRC, 4-6 November 2010*

Tabel 1 menunjukkan selama kurun waktu 7 tahun terakhir telah terjadi berbagai bencana alam dengan jenis bencana yang paling banyak menelan kerugian adalah gempa bumi disertai tsunami. Korban meninggal dunia maupun hilang banyak ditemukan, terutama saat bencana gempa di sertai tsunami. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut:

Table 2. Jumlah Korban Jiwa dan Kerusakan Akibat Bencana di Insarannesia

Bencana alam	Jumlah fasilitas sekolah yang rusak (dalam milyar Rupiah)	Jumlah Korban Jiwa
Gempa bumi dan sunami 26 Desember di Aceh-Nias	2,065	1,041.0 45.000 siswa meninggal 1, 870 guru hilang
Gempa 27 Mei 2006. Yogya-Jawa Tengah	2,907	1,739.0 5.716 orang meninggal; 36 guru meninggal
Gempa September 2009 Sumatera. Sumatera.	1,290	1.117 orang meninggal;
Gempa 02 September 2009. West Sumatera. Sumatera Barat.	618.8	1,117 orang meninggal
Gempa 12 September 2007, Bengkulu dan Sumatra Barat	2,358	399,8 81 orang meninggal
Banjir di Wasior, Papua Barat, October 2010		277,9 144 orang meninggal

Sumber: *Berbagai Laporan Kerusakan Bencana Alam dan Penilaian Rugi (2004-2010) dalam Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga (2010) dalam pemaparan Pertemuan Tingkat Tinggi pada Perlindungan Hak Anak di Asia dan Pasifik, Beijing, RRC, 4-6 November 2010*

Pada tabel di atas kerusakan dan jumlah korban jiwa sangat banyak. Wilayah pulau Sumatra sering terjadi gempa dan pada daerah yang dekat dengan pantai berpotensi tsunami sehingga dikhawatirkan akan menelan korban lebih banyak lagi. Negara Insarannesia yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan disamping letak geografis di antara tiga lempeng benua dan antara dua samudra menunjukkan kawaran rawan gempa yang memerlukan perhatian serius. Berbagai pengalaman bencana alam

yang pernah terjadi sebelumnya mendasari lahirnya berbagai kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya bencana berikutnya. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya:

1. Manajemen Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Pelaksanaan Manajemen Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22/2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2008 pada dukungan asing.
5. Rencana Pengelolaan Bencana Nasional 2010-2014.
6. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012.
7. Pemerintah Rencana Kerja Tahunan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yang meliputi manajemen bencana dan pengurangan resiko bencana yang dilakukan oleh departemen terkait dan pemerintah daerah.

Pendidikan mitigasi bencana menurut UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam pengarusutamaan pengurangan resiko bencana ke dalam sistem pendidikan dalam rencana aksi nasional yang termuat dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 yang mempunyai visi mewujudkan budaya aman dan siaga terhadap bencana melalui sistem desentralisasi pendidikan yang mampu mendukung pengurangan risiko bencana melalui upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas di sektor pendidikan. Meskipun demikian Saat ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan upaya pengurangan resiko bencana ke dalam sistem pendidikan, namun ditemukan berbagai kendala, antarlain:

1. Kebanyakan guru tidak memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen bencana PRB
2. Kurangnya pesaranman, silabus, dan materi pengajaran pada integrasi PRB ke dalam kurikulum sekolah yang dapat diakses oleh guru
3. Siswa kewalahan terhadap berbagai isu yang dibangun di sekolah (gender, korupsi, hak asasi manusia, PRB dan sebagainya) yang diintegrasikan ke kurikulum sekolah

4. Kondisi fisik sekolah, sarana dan prasarana umumnya tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak tahan gempa.
5. Belum ada peraturan dan /atau kebijakan dan pesaranman tentang integrasi pengurangan resiko bencana ke dalam kurikulum sekolah.
6. Minimal sumber daya (sumber daya manusia, infrastruktur dan alokasi anggaran) yang tersedia untuk pendidikan pengurangan resiko bencana. (*Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga, 2010*)

Namun demikian, upaya untuk membentuk sekolah siap dan siaga bencana perlu senantiasa digalakkan dengan mengacu kriteria yang sudah ditentukan dalam surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi untuk memberi pemahaman warga sekolah mengenai pengetahuan dan sikap terhadap bencana.
- b. Menyediakan kebijakan/program sekolah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah, termasuk pengaturan berbagai sarana prasarana yang aman untuk warga sekolah.
- c. Membuat rencana aksi sekolah untuk menghadapi bencana, termasuk pembuatan jalur evakuasi.
- d. Pelatihan komunitas sekolah dalam prosedur keadaan darurat bencana (simulasi drill dan peringatan dini).

Sekolah inklusi yang memiliki keragaman peserta didik memerlukan berbagai penyesuaian untuk mewujudkan sekolah siap dan siaga bencana seperti empat kriteria yang dikemukakan di atas.

C. Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah Inklusi

Anak-anak merupakan kelompok rentan apabila ada bencana yang terjadi dan diantara mereka terdapat kelompok yang paling rentan yaitu anak dengan kebutuhan khusus. Penanaman pendidikan mitigasi bencana bagi anak-anak tersebut termasuk anak dengan kebutuhan khusus sejak bangku SD mempunyai berbagai sisi positif. Beberapa hal yang menjadi pendukung pengajaran mitigasi bencana pada anak-anak yang diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah antarlain adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman anak terhadap bencana dan perubahan iklim berbeda jauh dengan orang dewasa dan saat ini belum menjadi perhatian khusus
2. Anak merupakan komunikator yang efektif dan persuasif terhadap perubahan yang ada di masyarakat
3. Anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana dan juga mempunyai kontribusi yang bermakna (*Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga, 2010*)

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mengetahui tentang bagaimana cara melindungi dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Di samping itu ABK merupakan salah satu kelompok paling rentan ketika terjadi bencana. Beberapa dari mereka memiliki hambatan mobilitas untuk melakukan perlindungan bahkan penyelamatan diri secara mandiri. Maka diperlukan adanya informasi bagaimana prosedur/ rencana penyelamatan bagi ABK yang memerlukan bantuan orang di sekitar mereka (misal: guru, teman, staf sekolah).

Keragaman dan keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi saat ini yang dapat diketahui dari data Direktorat Pendidikan Luar Biasa tahun 2007/2008 menunjukkan terdapat 15.144 anak yang bersekolah di sekolah inklusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3: Data Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi

No	Jenis Kebutuhan Khusus	Jumlah
1.	Gangguan penglihatan (tunanetra)	385 anak
2.	Gangguan pendengaran (tunarungu-wicara)	291 anak
3.	Gangguan mental (tunagrahita)	2219 anak
4.	Gangguan fisik (tunadaksa)	267 anak
5.	Gangguan perilaku (tunalaras)	291 anak
6.	Autis	230 anak
7.	Tunaganda	45 anak
8.	Kesulitan belajar dan lamban belajar	11.420 anak
9.	Indigo	32 anak

Sumber: Data statistik dari Direktorat PSLB tahun 2007/2008 dalam Sutji Harijanto (2011) *The Insarannesian Government Policy on Special Education in Global Perspective* pada International Seminar on Special Education, 19 Maret 2011.

Data tersebut di atas diperoleh dari 33 propinsi. Dari sekian ragam kebutuhan yang ada di sekolah inklusi maka untuk menerapkan pendidikan mitigasi bencana perlu memperhatikan kebutuhan khusus yang ada pada anak. Misal: keterbatasan fisik pada anak sehingga harus memerlukan kursi roda memerlukan jalur evakuasi dan orang yang membantu saat evakuasi keluar sekolah. Hal yang perlu dilakukan untuk merancang pendidikan mitigasi bencana di sekolah inklusi dengan mengacu kriteria sekolah siap dan siaga bencana menurut surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010, antarlain:

- a. Sosialisasi untuk memberi pemahaman warga sekolah mengenai pengetahuan dan sikap terhadap bencana. Sosialisasi ini dapat diintegrasikan dalam pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dengan berbagai alternatif yang disarankan dalam pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai berikut:
 1. Mengintegrasikan PRB kedalam mata pelajaran dari kurikulum yang berjalan.
 2. Mengintegrasikan PRB kedalam muatan lokal dari kurikulum yang berjalan.
 3. Mengintegrasikan PRB kedalam kegiatan ekstra kurikuler dari kurikulum yang berjalan.
 4. Menyenggarakan mata pelajaran PRB untuk muatan lokal dibawah kurikulum baru berbasis PRB.
 5. Membuat kegiatan ekstra kurikuler PRB dibawah kurikulum baru berbasis PRB.

- b. Menyediakan kebijakan/program sekolah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah, termasuk pengaturan berbagai sarana prasarana yang aman untuk warga sekolah. Beberapa penataan sarana prasarana seperti lemari, hiasan dinding, jarak antara kursi dengan meja berhasil diidentifikasi pada saat observasi di sekolah inklusi oleh tim dari ASB dan mahasiswa Jurusan PLB memerlukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk keamanan siswa saat terjadi bencana (misal: gempa) dan pada saat upaya evakuasi. Selain itu kondisi bangunan serta mebel yang sudah rapuh dan dimungkinkan roboh sewaktu-waktu memerlukan tanda supaya anak menghindari daerah tersebut agar tidak cidera. Beberapa penyesuaian tataruang dapat dilihat dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4: Penataan tataruang yang aman untuk anak

Hal yang perlu diperhatikan	Penyesuaian
1. Posisi lemari yang dekat dengan tempat duduk siswa	a) Jauhkan lemari dari tempat duduk siswa dan pintu masuk karena dapat menghalangi proses evakuasi bila dekat pintu masuk dan dimungkinkan merubuhi siswa.
2. Posisi lemari di dekat pintu masuk	b) Memasang siku yang dipaku dengan dinding
3. Posisi tempat duduk siswa dekat jendela	c) Pecahan jendela dapat melukai siswa sehingga jauhkan tempat duduk siswa dan pasang stiker pengaman pada kaca
4. Letak tempat duduk dengan jarak yang terlalu berhimpit	d) Posisi tempat duduk yang terlalu berhimpit mempersulit siswa saat berlindung di bawah meja saat terjadi gempa sehingga jaraknya perlu diperlebar.
5. Hiasan dinding di kelas yang dekat dengan tempat duduk siswa	e) Hiasan dimungkinkan menjatuhkan siswa sehingga perlu dijauhkan atau pemasangannya dibatasi sesuai keperluan.
6. Penempatan benda di atas lemari, misal: TV	f) Penempatan benda di atas lemari dapat menjatuhkan siswa dibawahnya. Pemasangan siku yang dipaku dengan dinding dianjurkan. g) Penempatan barang yang berat diletakkan di paling bawah, dan semakin ke atas semakin ringan.
7. Parkir sepeda dan motor di depan kelas	h) Penempatan tempat parkir khusus yang tidak menghambat jalur evakuasi.

Sumber: AHA: sekarang aku bisa (2009) Buku panduan Pembelajaran Materi PRB untuk ABK. Kerjasama ASB-Dinas Dikpora DIY-Jurusan PLB FIP UNY

- c. Membuat rencana aksi sekolah untuk menghadapi bencana, termasuk pembuatan jalur evakuasi. Pembuatan jalur evakuasi maupun peta bahaya dapat mengacu hal-hal berikut ini:
- 1) Identifikasi bahaya, pendukung, dan kelompok rentan di dalam tata ruang dan lingkungan sekolah.

- a) Bahaya merupakan segala sesuatu (tempat, benda, ataupun situasi) yang dapat menghambat evakuasi, contoh: posisi lemari yang dekat dengan tempat duduk siswa.
 - b) Pendukung merupakan segala sesuatu (tempat, benda, ataupun situasi) yang mendukung proses evakuasi, contoh: halaman sekolah sebagai tempat evakuasi.
 - c) Kelompok rentan merupakan seorang atau sekelompok orang yang lebih rentan ketika terjadi bencana, contoh: ABK pengguna kursi roda
- 2) Memposisikan bahaya, pendukung dan kelompok rentan dalam denah sekolah dengan memberi warna berbeda antara bahaya, pendukung dan kelompok rentan.
 - 3) Membuat rencana tindakan penyelamatan bagi ABK. Dalam membuat rencana tindakan penyelamatan, guru perlu mengenali kemampuan mobilitas ABK. Kemampuan mobilitas menurut ASB dibagi dalam beberapa kategori:

Tabel 5: Kategori kemampuan mobilitas ABK

Kategori	Keterangan	Rencana aksi
Kategori 1	ABK mampu melakukan perlindungan diri dan evakuasi secara mandiri	ABK sebaiknya duduk di depan, dekat dengan guru
Kategori 2	ABK mampu melakukan perlindungan diri tapi memerlukan bantuan untuk evakuasi	ABK sebaiknya duduk di depan, dekat dengan guru karena ABK memerlukan bantuan untuk evakuasi, maka perlu ditunjuk Penanggung Jawab yang akan membantunya, misalnya Guru Kelas atau teman sebangku/sekelasnya
Kategori 3	ABK tidak mampu melakukan perlindungan diri dan evakuasi secara mandiri.	ABK sebaiknya duduk di depan, dekat dengan guru. Karna ABK memerlukan bantuan untuk perlindungan diri dan evakuasi, maka perlu ditunjuk Penanggung Jawab yang akan membantunya, misalnya Guru Kelas atau teman sebangku/sekelasnya. ABK juga perlu disiapkan alat perlindungan diri, misalnya helm.

- 4) Menentukan jalur evakuasi untuk setiap ruangan di sekolah. Jalur evakuasi dapat menggunakan penunjuk arah yang jelas untuk menuju lapangan terbuka sebagai tempat berkumpul. Penentuan jalur evakuasi perlu menghindari: tiang

listrik karena dimungkinkan roboh, tower air, dan selokan yang terbuka karena dimungkinkan anak terperosok ke dalamnya.

- d. Pelatihan komunitas sekolah dalam prosedur keadaan darurat bencana (simulasi drill dan peringatan dini). Simulasi yang terhadap ABK memerlukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan khusus yang ada pada anak. Berikut ini beberapa saran untuk pemberian informasi kepada ABK berdasarkan kebutuhan mereka.

Tabel 6: Saran untuk pemberian informasi PRB kepada ABK

Jenis Kebutuhan khusus	Keterbatasan yang dimiliki	Tips Praktis	Saran
Autis	Keterbatasan bahasa	Informasi yang diberikan dalam bentuk visual, kinestetik dan taktil, misal: melalui video/film, gambar, simulasi dan demonstrasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posisikan anak di depan supaya dapat mendengar maupun melihat gerak bibir guru lebih jelas. ▪ Pastikan guru dan teman-temannya berbicara dengan jelas. Minta anak mengulang informasi untuk memastikan bahwa dia mendengarkan. ▪ Pastikan kontak mata dengan anak saat berbicara dengannya. Beritahukan kepada teman-temannya juga untuk melakukan hal sama saat berbicara dengan anak dengan gangguan penglihatan.
	Kewaspadaan terhadap bahaya rendah	<p>Mebutuhkan bantuan orang dewasa "sebagai alarm" bahaya</p> <p>Jelaskan prosedur penyelamatan dengan jelas dengan bahasa yang sederhana.</p>	
Gangguan Pendengaran (tunarungu wicara)	Keterbatasan Pendengaran,	Informasi yang diberikan dalam bentuk visual, kinestetik dan taktil, misal: melalui video/film, gambar, simulasi dan demonstrasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posisikan anak di depan supaya dapat mendengar maupun melihat gerak bibir guru lebih jelas. ▪ Pastikan guru dan teman-temannya berbicara dengan jelas. Tetapi tidak berteriak karena dapat menyebabkan kata terucap tidak jelas. ▪ Minta anak mengulang pertanyaan untuk memastikan

			<p>pemahamannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minta teman sebangku anak untuk mengulang apabila diperlukan. ▪ Pastikan wajah terarah ke anak saat berbicara dengannya. Beritahukan kepada teman-temannya juga untuk melakukan hal sama saat berbicara dengan anak dengan gangguan penglihatan.
		Membutuhkan tanda bahaya visual (lampu sirine)	
	Penguasaan bahasa terbatas	Jelaskan prosedur penyelamatan dengan jelas dengan bahasa yang sederhana.	
Gangguan emosi dan perilaku (tunalaras)	Keterbatasan yang dimiliki	Tips Praktis	Saran
	Berperilaku semaunya sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan kontrak belajar di awal pembelajaran - Menerapkan kontrak secara ketat 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memberikan pilihan tanggungjawab dalam proses belajar mengajar <input type="checkbox"/> Guru bersama anak menyepakati sanksi apabila anak melakukan hal-hal merugikan orang lain. <input type="checkbox"/> Guru menerapkan sanksi setiap anak melanggar kesepakatan
Gangguan penglihatan (tunanetra)	Keterbatasan yang dimiliki	Tips Praktis	Saran
	Keterbatasan Penglihatan	Informasi yang diberikan dalam bentuk auditif, kinestetik dan taktil, misal: melalui kaset, miniatur, simulasi dan gambar/tulisan besar bagi low vision.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ . Anak akan lebih diuntungkan dalam hal mobilitas jika ia didudukkan di depan, tapi tidak didekat pintu atau jendela. ▪ Pintu harus dalam keadaan terbuka penuh atau tertutup rapat ▪ Lakukan simulasi secara berkala dan terjadwal. ▪ Segera beritahu anak apabila ada perubahan tata letak ▪ Ucapkan kata pada saat masuk maupun keluar dari kelas atau ruangan.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panggil anak dengan namanya. ▪ Pergunakan kata-kata keterangan misal : maju, mundur, kanan, kiri ketika menjelaskan arah. Usahakan tidak menggunakan kata : ini, itu, disana, disini dll. ▪ Deskripsikan secara detail tentang hal-hal yang bersifat visual, ▪ Tidak perlu berkata keras-keras pada anak ▪ Sediakan teman untuk membantu anak ketika evakuasi
Gangguan fisik	Hambatan	Tips Praktis	Saran
(tunadaksa)	Keterbatasan gerak	<p>-Atur ruangan agar anak bebas gerak</p> <p>-Rute bebas hambatan antar tempat. Misal dari kelas menuju ke lapangan, saluran air ditutup, dsb</p> <p>-Sediakan barang yang diperlukan dalam jangkauan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atur jarak antar meja dan furniture agar bisa dilewati kursi roda ▪ Anak akan lebih diuntungkan dalam hal mobilitas jika ia didudukkan di depan ▪ Simpan barang pada rak yang tidak terlalu tinggi sehingga mudah diraih anak (idealnya sejajar dengan mata anak)
	Pada anak tunadaksa yang juga mengalami gangguan mental	Lihat pada anak dengan gangguan mental	
Gangguan intelektual	Keterbatasan yang dimiliki	Tips Praktis	Saran
(tunagrahita,slow learner)	Sulit memahami informasi abstrak	Informasi yang diberikan bersifat konkrit, misal dengan gambar, film dan demonstrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dudukkan anak tunagrahita, <i>slow learner</i> bersama teman. Jangan biarkan anak tunagrahita/slow learner duduk sendiri. ▪ Lakukan simulasi secara berkala dan terjadwal. ▪ Beri penjelasan kepada teman sebangku mengenai tugas dan perannya sebagai <i>peer tutor</i>
	Mudah lupa	<p>-Pengulangan informasi</p> <p>-Pembiasaan melakukan</p>	

		prosedur mengatasi bahaya	
	Kewaspadaan terhadap bahaya rendah	Mebutuhkan bantuan orang dewasa "sebagai alarm" bahaya	
	Tidak memiliki inisiatif	Mebutuhkan orang untuk memandu anak jika terjadi bencana	
	Rentang perhatian terbatas	Menyampaikan materi secara bertahap. Untuk di kelas yang beragam, fleksibilitas kedalaman materi diperlukan	

Sumber: ASB, Dinas Dikpora, Jurusan PLB (2009) Aha, Sekaran Aku Bisa: Panduan Pembelajaran Materi Pengurangan Risiko Bencana untuk Anak berkebutuhan Khusus

D. Penutup

Mewujudkan pendidikan mitigasi bencana di sekolah menjadi agenda utama untuk menjadikan para generasi muda lebih tanggap bencana pada era-era di masa mendatang. Khususnya di sekolah inklusi, diperlukan berbagai penyesuaian dari segi sarana penunjang sampai dengan kebijakan sekolah. Hal tersebut menjadi pembelajaran bermakna bagi anak lainnya untuk memperhatikan kebutuhan berbagai kondisi di sekitarnya. Dengan tetap mengacu pada pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di sekolah maka langkah-langkah: a) Sosialisasi untuk memberi pemahaman warga sekolah mengenai pengetahuan dan sikap terhadap bencana, b) Menyediakan kebijakan/program sekolah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah, termasuk pengaturan berbagai sarana prasarana yang aman untuk warga sekolah, c) Membuat rencana aksi sekolah untuk menghadapi bencana, termasuk pembuatan jalur evakuasi dan d) Pelatihan komunitas sekolah dalam prosedur keadaan darurat bencana (simulasi drill dan peringatan dini) juga dapat diterapkan di sekolah inklusi.

Kajian Pustaka

ASB, Dinas Dikpora, Jurusan PLB (2009) *Aha, Sekaran Aku Bisa: Panduan Pembelajaran Materi Pengurangan Risiko Bencana untuk Anak berkebutuhan Khusus*

Nina Sardjunani dan Hadi Suprayoga (2010) *Country Experience: Advancing Child Rights in Disaster Risk Reduction Initiatives in Insarannesia*. Pertemuan Tingkat Tinggi pada Perlindungan Hak Anak di Asia dan Pasifik, Beijing, RRC, 4-6 November 2010

Sutji Harijanto (2011) *The Insarannesian Government Policy on Special Education in Global Perspective* pada International Seminar on Special Education, 19 Maret 2011.

Surat Edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Sistem Pendidikan

Undang-Undang Republik Insarannesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana